



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Diblokir satu, muncul situs abru, apakah pemberantasan situs judol selama ini sudah tepat?
Tanggal : Jumat, 03 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Diblokir Satu, Muncul Situs Baru Apakah Pemberantasan Situs Judol Selama Ini Sudah Tepat?

Pemberantasan judi online (judol) di Tanah Air seperti tiada habisnya. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) gencar memblokir jutaan situs. Namun, tetap saja ruang digital dibanjiri judol.

Komdigi pun menjelaskan, tantangan dalam memberantas judi online (judol) adalah para bandar terus membuat situs baru, meskipun situs mereka baru saja diblokir Pemerintah.

"Gencarnya kita melakukan penutupan situs itu, promosi juga gencar. Jadi mereka menyediakan beragam situs. Ketika salah satu situs ditutup, muncul situs yang baru dibentuk," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital

Komdigi, Alexander Sabar, dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dia menambahkan, para pelaku atau bandar judol kemudian menggencarkan promosi situs melalui media sosial (medsos). Alexander mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pemberantasan judol, karena para pelaku telah menyiapkan banyak domain sebagai cadangan.

Menurut Alexander, munculnya situs-situs baru membuat pelaku semakin agresif mempromosikan alamat situs pengganti kepada masyarakat. Salah satu cara yang kini digunakan adalah membantiri kolom komentar akun me-

dia sosial yang memiliki jumlah pengikut dan interaksi tinggi dengan spam berisi tautan menuju situs judol.

"Sehingga pergeseran ini juga menjadi hal yang membutuhkan *awareness* (kesadaran) dari kita semua," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan, DPR berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah dalam menjaga ruang digital yang sehat, aman, dan produktif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut dia, Pemerintah sudah melakukan langkah terbaik dalam mengantisipasi maupun menindak judol.

"Pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan berbagai lang-

kah pencegahan dan pemberantasan," tegas Dave Laksono kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (30/6/2026).

Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi memberikan analisis terkait sistem judi online yang membuatnya kebal dari aksi blokir Pemerintah saat ini. Menurut dia, kegagalan taktis ini terjadi karena selama ini yang diputus hanya lapisan terlemah dan termurah yang dimiliki bandar judol, yakni nama domain.

"Sementara nyawa bisnis mereka yang sebenarnya sama sekali tidak tersentuh oleh sensor *Domain Name System* (DNS) domestik," ungkap Ismail kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (30/6/2026).

Ismail menambahkan, infrastruktur judi online merupakan sistem berlipis yang canggih dan terindustrialisasi secara internasional. Dia menilai, blokir massa berbasis DNS Trust Positif yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah sudah usang.

"Tindakan itu sudah usang jika berdiri sendiri tanpa diikuti operasi pemutusan likuiditas keuangan dan intervensi jaringan server hulu di tingkat global," tambah Ismail.

Untuk mengetahui pandangan Dave Laksono dan Ismail Fahmi mengenai fenomena satu situs judi online diblokir, lalu satu situs baru muncul, berikut wawancaranya.

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi I DPR

Perlu Koordinasi Lintas Sektoral



“Pemerintah perlu memperkuat intervensi terhadap perusahaan platform digital. Media sosial tidak boleh menjadi ruang bebas bagi praktik ilegal yang merusak generasi muda.”

Apa tanggapan Anda terhadap pernyataan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahwa saat satu situs judi online (judol) ditutup Pemerintah, situs baru kembali bermunculan?

Fenomena judi di Indonesia terus berkembang, meskipun Pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan. Penutupan satu situs sering kali diikuti dengan munculnya situs baru, yang menunjukkan bahwa jaringan ini bersifat adaptif dan terorganisir.

Sebenarnya, apa kerugian yang paling nyata dari judol ini? Tentu ini menjadi tantangan serius bagi kita semua karena dampaknya bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam moralitas dan ketahanan sosial bangsa.

Lalu, bagaimana Anda melihat upaya Pemerintah dalam mencegah dan memberantas situs judol selama ini?

Kami dari Komisi I DPR selaku mitra kerja Komdigi melihat bahwa upaya Pemerintah selama ini sudah cukup intensif, baik melalui pemblokiran situs maupun penindakan hukum. Namun, kita perlu menekankan bahwa pemberantasan judi online tidak bisa dilakukan secara parsial.

Seharusnya bagaimana? Harus ada koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, melibatkan Komdigi, aparat penegak hukum, serta lembaga keuangan untuk menutup celah transaksi.

Media sosial digunakan sebagai sarana promosi judol. Seharusnya bagaimana intervensi Pemerintah terhadap platform medsos untuk mengantisipasi promosi judol? Terkait promosi judol di media sosial, Pemerintah perlu memperkuat intervensi terhadap perusahaan platform digital. Media sosial tidak boleh menjadi ruang bebas bagi praktik ilegal yang merusak

generasi muda.

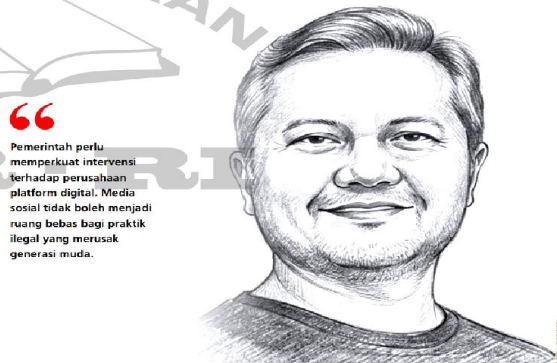
Langkah konkret yang dapat dilakukan Pemerintah terkait medsos ini? Oleh karena itu, kerja sama dengan perusahaan teknologi global harus ditingkatkan agar konten promosi judi online dapat segera diturunkan dan akun-akun yang terlibat bisa diblokir secara permanen.

Menurut Anda, apa solusi untuk mengurangi keberadaan situs judol dan mencegah munculnya situs baru?

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah maupun DPR harus mengeksplorasi pendekatan yang komprehensif, yaitu memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keberadaan situs judi online dapat ditekan secara signifikan sekaligus mencegah munculnya situs baru. ■ NNM

ISMAIL FAHMI, Founder Drone Emprit

Blokir, Putuskan Juga Aliran Dana



“Pemerintah perlu memperkuat intervensi terhadap perusahaan platform digital. Media sosial tidak boleh menjadi ruang bebas bagi praktik ilegal yang merusak generasi muda.”

Apa tanggapan Anda terkait pernyataan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahwa satu situs judi online (judol) ditutup, lalu satu situs baru muncul?

Pemberantasan judol di Indonesia memang menghadapi paradoks yang berulang. Pemerintah memutus akses jutaan situs, namun situs baru terus lahir hampir seketika. Komdigi mencatat perampasan 126.180 konten judol sepanjang 1–28 Juni 2026 dan lebih dari 3,45 juta situs sejak Oktober 2024, sementara perputaran dananya pada 2025 masih sekitar Rp286 triliun. Akar persoalannya bersifat arsitektural, bukan sekadar persoalan volume.

Bagaimana catatan Anda terkait kasus ini?

Temuan inti laporan ini, yang diblokir Komdigi pada dasarnya adalah nama domain, yaitu lapisan paling lemah dan paling murah untuk diganti, melalui mekanisme penyanggiran DNS Trust Positif. Sementara itu, server inti atau “server utama” berada

di luar negeri. Dalam kasus sindikat Hayam Wuruk, server teracak berada di Brasil, Filipina, China, dan Vietnam serta disembunyikan di balik jaringan *Cloudflare* yang dipakai oleh sekitar 76 persen situs judol.

Apakah yang dilakukan Pemerintah dalam memblokir sudah tepat?

Memblokir domain tidak menyentuh server ini sama sekali. Inti persoalan dalam satu kalimat adalah negara memutus lapisan yang paling mudah dipulihkan pelaku (domain, biaya recehan, pulih dalam hitungan menit), bukan lapisan yang menjadi nyawa bisnisnya (server inti dan aliran dana).

Lalu, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan?

Strategi yang paling berdampak bukan mempersempit lomba blokir domain, melainkan menggeser titik tekan ke lapisan yang sulit dipindahkan pelaku. Misalnya, lapisan keuangan (*follow the money*). Pembekuan rekening, *e-wallet*, *QRIS*, dan aset kripto

secara terkoordinasi oleh Komdigi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia (BI), hingga penyitaan aset. Inilah yang paling melumpuhkan insentif ekonomi pelaku, termasuk bandar yang fisiknya berada di wilayah hukum asing.

Selain itu?

Menegakkan kewajiban PSE dan kerja sama wajib dengan *Cloudflare* untuk membuka IP origin serta mempersempit *lookup* di hulu. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama penegakan hukum lintas negara karena server fisik berada di wilayah hukum asing.

Menurut Anda, apakah Pemerintah bisa menghilangkan situs judol secara permanen?

Selama platform berada di luar negeri dan saldo pemain tetap aman, bisnis akan terus berjalan. Domain baru biasanya pintu masuk baru ke sistem yang sama. Domain cadangan sudah disiapkan sejak awal. ■ NNM